



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EVY HARYADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR TRANSMISI DAN PERENCANAAN SISTEM**
3. NHK : **186422**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/216 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/101 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **803.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE JEEP Tahun 2015, LAINNYA Rp. 230.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC TURBO SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. MOTOR, YAMAHA R15M WGP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
6. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000



7. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

40.000.000

8. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 43.539.414.879

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.876.155.275

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 53.648.570.154

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 53.648.570.154

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.